



Penggunaan Uang Negara Harus Dipertanggungjawabkan

SAMBAS - Setiap penggunaan uang negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan Bupati Sambas, H Satono saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2021 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat di Pontianak. "Setiap penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan BPK," kata Bupati Sambas, H Satono, belum lama ini.

Sebagai Orang nomor satu di Kabupaten Sambas, dirinya meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, dalam penggunaan anggaran tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, dalam rangka pembangunan di daerah ini.

"Saya meminta seluruh OPD untuk bekerja maksimal dan sesuai rambu-rambu yang sudah ada, terutama dalam pengelolaan keuangan," katanya.

Bupati Sambas, Satono, menerima LHP yang diserahkan ke BPK RI, merupakan laporan secara keseluruhan penggunaan keuangan negara di Pemkab Sambas. Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan.

"LHP yang diserahkan BPK RI Perwakilan Kalbar adalah

LHP dengan tujuan tertentu atas pemeriksaan kinerja dan kepatuhan di semester II tahun 2021. Jenis pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan keuangan dan

kinerja pemerintah daerah," katanya.

Satono menyampaikan, dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sambas tahun sebelumnya, Pemkab

Sambas meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Diharapkan, hal itu bisa diperoleh di tahun ini dan tahun-tahun yang akan da-

tang.

LHP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Rahmadi, di Pontianak. Hadir dalam kegiatan itu adalah Ketua DPRD Sambas, H Abu Bakar. Dikeempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Sambas mengapresiasi LHP dari BPK RI. Diharapkan di Pemerintahan Kabupaten Sambas, dalam pengelolaan keuangan negara terlaksana dengan baik, dan mematuhi aturan yang berlaku. "Kami di legislatif berharap pengelolaan keuangan negara di Kabupaten Sambas bisa terus terselenggara dengan baik. Penting juga menjaga sinergitas eksekutif dan legislatif beserta jajaran terkait untuk mewujudkan hal itu," katanya.

Ditambahkannya, Pemkab Sambas dan DPRD Sambas memiliki kepentingan sama, yakni bagaimana menggunakan keuangan negara dengan baik, hasil pemeriksaan bisa mendapatkan opini terbaik dan pembangunan berjalan dan masyarakat menikmatinya.

"Kami, dan ini menjadi keinginan semua pihak, hasil pemeriksaan keuangan meraih predikat Opini WTP. Untuk itulah, harus sama-sama melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan memperhatikan regulasi dan rambu-rambu yang telah ditetapkan," katanya. *(fah)*